

BAB II

DINAMIKA KONFLIK SAHARA BARAT DAN KEBIJAKAN ENERGI MAROKO PROYEK NOOR OUARZAZATE *SOLAR COMPLEX*

Maroko memanfaatkan momentum transisi energi hijau global sebagai strategi untuk memperkuat posisinya dalam persaingan dengan Aljazair. Ambisi ini bersakar dari kondisi Maroko sebagai negara yang minim sumber daya energi fosil dan bergantung pada impor minyak dan gas, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Ketergantungan tersebut mendorong Maroko mengembangkan strategi jangka panjang melalui energi terbarukan, salah satunya melalui Proyek Noor sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi sekaligus daya saing di tingkat internasional. Dalam konteks ini, Sahara Barat tidak hanya menjadi latar konflik, tetapi juga sebagai arena strategis dalam dinamika persaingan geoekonomi energi. Oleh karena itu, bagian ini membahas persaingan energi Maroko dan Aljazair, dinamika konflik Sahara Barat dan Fragmentasi Politik dan Sosial Masyarakat Sahara Barat.

2.1. Persaingan Energi Maroko dan Aljazair dalam geoekonomi Energi

Persaingan energi antara Maroko dan Aljazair berfokus pada mengamankan posisi strategis dalam pasar energi regional dan global. Aljazair dikenal sebagai eksportir utama gas alam ke Eropa, sementara Maroko mengembangkan energi terbarukan sebagai strategi alternatif untuk meningkatkan daya saingnya (Lacher, 2021). Perbedaan struktur energi ini menjadi dasar utama rivalitas, di mana masing-masing negara mengembangkan model kekuatan energi yang berbeda namun saling berkompetisi dalam memperebutkan pengaruh regional.

2.2.1. Latar belakang Rivalitas antara Maroko dan Aljazair

Rivalitas antara Maroko dan Aljazair terjadi salah satunya dalam dimensi energi. Perbedaan kondisi sumber daya dan strategi energi menjadi faktor utama yang memperdalam persaingan kedua negara. Aljazair memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar dan menjadi salah satu eksportir energi utama di Afrika Utara,

bahkan berperan sebagai pemasok penting bagi Eropa (International Energy Agency, 2022). Ketergantungan ekonomi Aljazair terhadap sektor hidrokarbon membuat energi menjadi instrumen kekuatan nasional sekaligus alat diplomasi untuk mempengaruhi negara-negara mitra. Sementara itu, Maroko menghadapi keterbatasan sumber energi fosil sehingga berfokus pada energi terbarukan. Investasi besar-besaran dalam energi matahari dan angin, terutama melalui proyek-proyek skala besar, menunjukkan strategi Maroko untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus menciptakan posisi geopolitik baru (Boukhars, 2019).

Perbedaan struktural ini menciptakan pola persaingan yang unik. Aljazair mempertahankan pengaruhnya melalui energi fosil yang memberikan keuntungan jangka pendek dan pengaruh geoekonomi langsung. Sedangkan Maroko membangun keunggulan jangka panjang melalui inovasi energi terbarukan. Rivalitas energi ini juga berkaitan dengan Sahara Barat, karena wilayah tersebut memiliki potensi strategis untuk pengembangan energi, infrastruktur, dan akses logistik. Maroko melihat Sahara Barat sebagai jalur untuk mengintegrasikan energi dan ekonomi regional, sementara Aljazair memandang langkah ini sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuasaan regional (Zunes & Mundy, 2010; Lacher, 2020). Dari perspektif geoekonomi, rivalitas energi Maroko dan Aljazair menunjukkan bagaimana kontrol sumber daya dan akses wilayah strategis (Sahara Barat) menjadi instrumen proyeksi kekuatan regional. Dalam studi keamanan energi, perbedaan paradigma energi fosil di Aljazair dengan energi terbarukan di Maroko mengindikasikan dua model keamanan energi: keamanan berbasis sumber daya yang rawan fluktuasi pasar global (Aljazair) dan keamanan berbasis inovasi dan diversifikasi yang adaptif terhadap transisi energi global (Maroko). Dua situasi ini

menunjukkan energi berfungsi sebagai alat legitimasi politik, pengaruh regional, sekaligus faktor determinan dinamika konflik.

2.2.2. Strategi Rivalitas Aljazair: Diplomasi Pipa dan Delegitimasi Hukum.

Strategi Aljazair dalam membendung pengaruh Maroko dilakukan melalui kebijakan "Pengepungan Geoekonomi" yang berfokus pada megaprojek *Trans-Saharan Gas Pipeline* (TSGP). Proyek ini dirancang untuk menyalurkan gas dari Nigeria melalui Niger langsung ke Aljazair menuju Eropa, yang secara spesifik bertujuan untuk mematikan relevansi proyek pipa gas Nigeria-Maroko (NMGP) yang direncanakan melintasi pesisir Sahara Barat (Boukhars, 2015). Dengan mempromosikan TSGP yang lebih pendek dan murah, Aljazair berupaya memastikan bahwa Sahara Barat tetap menjadi wilayah yang terisolasi dari arus logistik energi internasional, sehingga wilayah tersebut tetap berada dalam status "wilayah konflik" yang tidak produktif bagi investasi Maroko. TSGP adalah senjata diplomatik Aljazair untuk "membunuh" nilai ekonomi Sahara Barat di mata dunia. Dengan mengalihkan rute energi menjauh dari pesisir Atlantik, Aljazair sedang menerapkan strategi pemiskinan nilai strategis wilayah sengketa. Strategi ini secara langsung menjadikan Sahara Barat sebagai korban marginalisasi pembangunan. Aljazair lebih memilih wilayah tersebut tetap tidak berkembang dan tidak memiliki jalur pipa internasional demi memastikan Maroko tidak mendapatkan royalti ekonomi maupun legitimasi politik dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Selain itu, Aljazair menerapkan strategi "Sabotase Hukum" untuk mendelegitimasi setiap proyek energi Maroko, termasuk perluasan Proyek Noor ke wilayah sengketa. Melalui dukungan terhadap Front Polisario di pengadilan internasional, Aljazair melabeli proyek energi Maroko sebagai bentuk *Green washing* atau

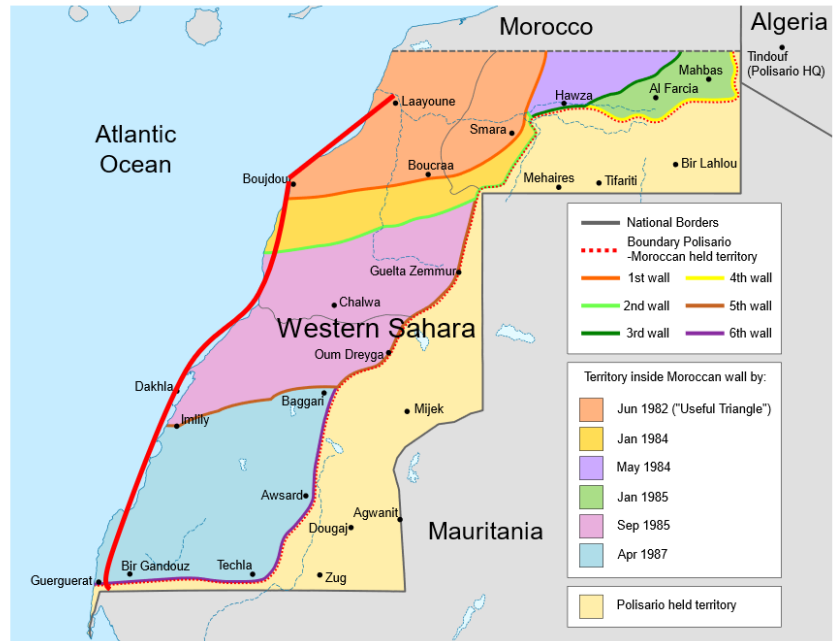
pencucian dosa pendudukan melalui narasi lingkungan (WSRW, 2022). Strategi ini bertujuan untuk menakuti lembaga donor internasional (seperti Bank Dunia dan Uni Eropa) agar tidak mendanai proyek Maroko di Sahara Barat, dengan menyoroti risiko hukum terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang belum merdeka (*Non-Self-Governing Territory*). Aljazair sedang melakukan "blokade investasi" dengan memanfaatkan celah hukum internasional. Aljazair menggunakan isu hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat Sahrawi sebagai perisai untuk melindungi kepentingan hegemoni gasnya. Dalam permainan ini, rakyat Sahrawi menjadi pion dengan diberikan dukungan politik oleh Aljazair bukan untuk kemandirian ekonomi, melainkan untuk memastikan bahwa proyek-proyek Maroko di tanah mereka tetap dianggap ilegal dan tidak bankable oleh dunia internasional.

2.2.3. Strategi Rivalitas Maroko: Proyek Noor Ouarzazate

Strategi Maroko dalam menghadapi persaingan regional dengan Aljazair berpusat pada pencapaian *Energetic Sovereignty* melalui megaprojek *Noor Ouarzazate Solar Complex*. Proyek Noor merupakan pembangkit listrik tenaga surya raksasa yang dibangun Maroko di Ouarzazate, di tepi Gurun Sahara. Proyek ini memiliki kapasitas mencapai sekitar 580 MW menjadikannya kompleks tenaga surya terkonsentrasi (CSP) terbesar di dunia. Keunggulan utama proyek ini terletak pada teknologi CSP dengan sistem penyimpanan panas yang memungkinkan produksi listrik tetap berjalan meskipun tanpa sinar matahari. Dengan karakteristik tersebut, Maroko memperoleh sumber listrik yang lebih stabil dan, sehingga membantu mengurangi ketergantungan pada energi impor dalam jangka panjang (MASEN, 2020; IEA, 2023). Proyek ini juga berperan sebagai strategi *energy security*, strategi *soft power* Maroko dalam membangun citra internasional sebagai pemimpin energi hijau di kawasan MENA (*Middle East and North Africa*).

Maroko jugs memanfaatkan situasi dengan mengekspansi Proyek di wilayah sengketa, yang tergambaran dengan peta dibawah ini :

Gambar 2. 1 Lokasi Pembangunan Proyek



Sumber : commons Wikimedia, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan peta diatas, Proyek *Noor* terletak di Laayoune, Selatan Boujdour, dan Dakhla Wind Farm yang digambarkan melalui garis merah. Secara fisik terletak di wilayah Sahara Barat yang diakui sepihak oleh Maroko sebagai wilayah Maroko Selatan. Penetapan lokasi ini dikarenakan wilayah yang cukup strategis karena memiliki potensi energi surya dengan tingkat radiasi matahari tertinggi di dunia dan stabil. Selain itu, adanya lahan yang luas dengan angin kencang untuk pembangunan ladang turbin angin yang berfungsi untuk diversifikasi sumber energi serta mengurangi risiko intermitensi listrik yang dihasilkan oleh surya (Bouoiyour & Selmi, 2012), dan jarak geografis yang relatif dekat ke pasar energi Eropa (San Martín, 2010). Penempatan lokasi Pembangunan noor dinilai sebagai bentuk eksploitasi energi Maroko terhadap wilayah sengketa untuk memperkuat legitimasi politik Maroko (San Martín,

2010). kombinasi energi angin dan surya juga mendukung rencana Maroko untuk mengekspor listrik ke Eropa melalui proyek kabel bawah laut menuju Spanyol dan Inggris, sehingga aspek energi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan noor terhadap dinamika Sahara Barat dalam kepentingan geoekonomi dan keamanan energi kawasan (El-Katiri, 2014).

Akan tetapi, secara perizinan proyek Noor dianggap ilegal. Berdasarkan putusan *European Court of Justice* (2021) secara tegas menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi di wilayah tersebut wajib mendapatkan persetujuan sah dari rakyat setempat yang diwakili Front Polisario. Kenyataannya, proyek yang dikelola oleh *Moroccan Agency for Sustainable Energy* (MASEN) ini dinilai mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) (World Bank, 2015a). konsultasi informatif yang dilakukan Maroko hanyalah formalitas administratif yang gagal menyentuh esensi hak politik masyarakat Sahrawi, sehingga menjadikan mereka sebagai penonton di tengah eksploitasi tanah leluhur mereka sendiri. Keterlibatan aktor internasional seperti *World Bank* yang menyetujui pendanaan sebesar US\$400 juta serta *African Development Bank* (AfDB) dalam pembangunan Noor I, II, dan III, semakin memperumit posisi Sahara Barat sebagai area perang (World Bank, 2020; AfDB, 2016). Pendanaan global ini digunakan Maroko sebagai strategi diplomasi untuk "mengunci" kepentingan negara-negara donor pada stabilitas kontrol Maroko atas wilayah sengketa.

Pembangunan ini merupakan serangan balik terhadap dominasi energi fosil Aljazair. Dengan mengekspor listrik ke Eropa melalui kabel bawah laut, Maroko berusaha menggantikan posisi Aljazair sebagai pemasok energi utama di kawasan (San Martín, 2010; El-Katiri, 2014). Sahara Barat diposisikan sebagai "senjata" sekaligus "korban"; kekayaan alamnya dieksploitasi oleh Maroko

untuk memenangkan persaingan pengaruh regional dengan Aljazair, tanpa memberikan ruang kedaulatan bagi penduduk asli Sahrawi. Penempatan Proyek Noor di wilayah sengketa merupakan upaya sistematis Maroko untuk menormalisasi klaim wilayah melalui pembangunan infrastruktur berskala besar. Kehadiran proyek energi nasional ini memperkuat citra bahwa Sahara Barat adalah bagian organik dari agenda pembangunan Maroko. Namun, dari aspek legalitas internasional, Sahara Barat muncul sebagai korban dari pengabaian hak kedaulatan.

2.2.4. Sahara Barat dalam Pusaran Perang Energi: Eksploitasi dan Pelanggaran Hak

Sahara Barat kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai hamparan gurun yang diperebutkan secara teritorial, melainkan telah bertransformasi menjadi episentrum "perang energi" yang melibatkan teknologi hijau Maroko dan kekuatan fosil Aljazair. Dalam pusaran geoekonomi ini, wilayah tersebut menjadi objek eksploitasi di mana sumber daya alamnya (sinar matahari dan angin) dikapitalisasi untuk memperkuat posisi tawar aktor-aktor negara tetangga. Pembangunan infrastruktur energi seperti Proyek Noor di wilayah sengketa menciptakan realitas baru di mana kedaulatan ditanamkan melalui instalasi panel surya dan turbin angin, sebuah fenomena yang oleh para kritikus disebut sebagai "*green-grabbing*" atau perampasan lahan atas nama transisi energi hijau (Western Sahara Resource Watch, 2022). Transisi energi yang diusung Maroko di Sahara Barat merupakan bentuk "pendudukan generasi baru". Jika pada masa lalu pendudukan dilakukan melalui kekuatan militer, kini Maroko menggunakan kabel transmisi dan energi bersih sebagai alat legitimasi politik. Penulis melihat bahwa Sahara Barat di sini adalah korban ganda: pertama, kehilangan kedaulatan atas tanahnya, dan kedua, kehilangan kedaulatan atas masa depan

energinya yang dikelola sepenuhnya oleh otoritas Maroko demi kepentingan ekspor ke Eropa.

Ketidaksesuaian prosedur dalam pembangunan Proyek Noor di wilayah sengketa juga mempertegas status Sahara Barat sebagai korban pelanggaran hak. Putusan *European Court of Justice* (2021) secara eksplisit menekankan bahwa persetujuan dari rakyat Sahara Barat merupakan syarat mutlak bagi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (European Court of Justice, 2021). Namun, fakta bahwa proses konsultasi oleh MASEN hanya bersifat informatif dan terbatas menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) (World Bank, 2015a). Hal ini menciptakan jurang pemisah antara penduduk asli Sahrawi yang mendambakan penentuan nasib sendiri dan pemerintah Maroko yang mengejar integrasi ekonomi nasional. Situasi ini menjadikan marginalisasi hak penduduk asli adalah konsekuensi langsung dari rivalitas Maroko-Aljazair. Dalam upaya memenangkan perlombaan pengaruh dengan Aljazair, Maroko cenderung mengabaikan standar hukum internasional demi percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat *fait accompli*. Akibatnya, rakyat Sahrawi dipaksa menjadi penonton dalam eksploitasi sumber daya milik mereka sendiri yang digunakan Maroko sebagai alat tawar diplomatik.

Fragmentasi sosial yang terjadi di antara masyarakat Sahrawi juga tidak dapat dilepaskan dari peran Aljazair yang menjadikan isu ini sebagai instrumen kontra-hegemoni. Keberadaan puluhan ribu pengungsi di Tindouf, Aljazair, menjadi simbol perlawanan sekaligus bukti nyata kegagalan diplomasi regional (UNHCR, 2021). Sementara Maroko memamerkan kemajuan energi di wilayah pendudukan untuk menarik dukungan Barat, Aljazair menggunakan penderitaan pengungsi dan narasi dekolonisasi untuk menghambat legitimasi internasional Maroko (Zunes & Mundy, 2010). Dinamika ini menunjukkan bahwa kedua negara sedang

menjadikan Sahara Barat sebagai "bidak catur" dalam perebutan dominasi di Afrika Utara. Sahara Barat adalah korban dari konvergensi kepentingan geoekonomi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia dieksploitasi oleh kebijakan energi Maroko untuk menandingi Aljazair, dan di sisi lain, aspirasi politiknya diinstrumentalisasi oleh Aljazair untuk menjaga keseimbangan kekuatan regional. Selama Sahara Barat tetap berada dalam pusaran perang energi ini, penyelesaian konflik secara adil akan terus terhambat oleh kepentingan materialistik para aktor besar.

2.2. Dinamika Konflik Sahara Barat

Pada awal 1970-an, Spanyol mengalami kelemahan kontrol terhadap Sahara Barat karena krisis politik domestik pasca-Franco dan meningkatnya tekanan internasional terhadap kolonialisme. Situasi ini diperburuk oleh tekanan mobilisasi *Green March* oleh Maroko. Tekanan *Green March* memaksa Spanyol menandatangani Perjanjian Madrid, yang berisikan penyerahan Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania tanpa melalui referendum sebagaimana mandat PBB. Kondisi inilah yang kemudian memulai dinamika konflik Sahara Barat yang dibagi menjadi 3 fase, yakni:

2.3.1. Konfrontasi Militer dan Polarisasi Politik (1975–1991)

Fase awal dinamika konflik Sahara Barat dimulai setelah penandatanganan *Madrid Accords*, yang membagi wilayah Sahara Barat menjadi diduduki oleh Maroko dan Mauritania tanpa referendum sebagaimana mandat PBB (Zunes & Mundy, 2010). Penanda tangan ini memicu perang terbuka karena Front Polisario menolak pembagian wilayah tersebut dan melakukan perlawanan bersenjata untuk memperjuangkan kemerdekaan Sahrawi. Sepanjang akhir 1970-an, Polisario terus melakukan tekanan militer kepada Maroko dan Mauritania dengan bantuan logistik dan militer dari Aljazair (Pazzanita, 2006). Pada 1976, Front Polisario

memproklamasikan Republik Arab Sahrawi Demokratik (SADR), yang kemudian memperoleh pengakuan dari sejumlah negara Afrika. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaan, Front Polisario tetap melakukan tekanan militer berkepanjangan hingga Mauritania menarik diri pada 1979 dan mengakui SADR. Situasi ini membuka kekosongan kekuasaan yang segera dimanfaatkan Maroko dengan memperluas kontrolnya hingga 70% wilayah Sahara Barat (Zoubir, 1990).

Pada awal 1980-an, dinamika konflik berubah ketika Maroko membangun *the Berm*. *Berm* merupakan tembok pasir besar yang memisahkan wilayah kekuasaan Maroko dan Front Polisario. Tujuan utama pembangunan *Berm* ini untuk mengurangi mobilitas militer Front Polisario, mengamankan pusat populasi, dan mempertahankan wilayah kaya fosfat serta zona pesisir Atlantik (San Martín, 2017). Setelah Pembangunan berm, keseimbangan konflik berubah drastis. Serangan gerilya Polisario menjadi jauh lebih sulit dilakukan hingga konflik memasuki fase kelelahan militer pada tahun 1980-an (Mundy, 2020). Menurunnya efektivitas militer, PBB dan OUA hadir untuk memfasilitasi Proposal Settlement (*Settlement Plan*) kepada Sahara Barat dan Maroko. Dokumen ini menawarkan gencatan senjata dan pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahrawi, di mana pemilih akan menentukan apakah Sahara Barat merdeka atau bergabung dengan Maroko (Zoubir & Volpi, 2019). Alhasil, pada tahun 1991, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 690 (1991) yang membentuk United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).

MINURSO merupakan badan gabungan yang berguna untuk memantau gejatan senjata, mengawasi pertukaran tahanan, mengatur repartisipasi pengungsi Sahrawi, menyusun daftar

pemilih, dan melaksanakan referendum (UNRC, 2018). Gencatan senjata resmi dimulai pada 6 September 1991, dengan ketentuan adanya pemberhentian total operasi militer, penetapan zona penyangga dan mekanisme pemantauan oleh minurso, dan larangan penempatan pasukan tambahan di sepanjang berm. Setelah gencatan senjata arena perang berpindah ke arena diplomatik mengenai perbedaan hak pemilih referendum.

2.3.2. Gencatan Senjata, Kebuntuan Diplomatik (1991– Sekarang)

Setelah gencatan senjata 1991, konflik memasuki fase *no peace, no war* dengan pembentukan MINURSO sebagai lembaga pemantau (United Nations Security Council, 1991). MINURSO bertugas memantau gencatan serta persiapan identifikasi pemilih. Akan tetapi, proses identifikasi ini terhambat karena adanya kebuntuan politik terkait penentuan kriteria pemilih yang sah. Kebuntuan ini mengakibatkan pelaksanaan referendum tertunda. (United Nations Security Council, 1995). Sepanjang 1990–an hingga 2000–an, Dewan Keamanan berkali-kali memperpanjang mandat MINURSO tanpa kemajuan signifikan menuju penyelesaian akhir, sehingga misi ini cenderung mempertahankan status quo ketimbang mendorong penyelesaian dekolonisasi (Lagdaf & Zoubir, 2022). Pada periode ini dapat disimpulkan bahwa prosesi dekolonisasi telah dimandatkan, tetapi dalam implementasinya gagal menghasilkan kemajuan substantif menuju penentuan nasib rakyat Sahrawi.

Kegagalan melaksanakan referendum membuat konflik Sahara Barat dikategorikan sebagai *frozen conflict*. Dalam perspektif teori konflik, *frozen conflict* dipahami sebagai bentuk konflik yang secara struktural tetap berlangsung meskipun tidak lagi diekspresikan melalui kekerasan terbuka. Teori konflik menekankan bahwa pertentangan sosial atau politik tidak benar-benar berakhir

selama ketimpangan kekuasaan, dominasi, dan perebutan kepentingan yang melandasi konflik tidak diubah (Dahrendorf, 1959). Konflik yang tidak lagi berlangsung secara militer terbuka karena adanya gencatan senjata, tetapi tetap tidak terselesaikan secara politik karena tidak adanya perkembangan menuju penyelesaian akhir. Menurut *Working Paper on Western Sahara*, sampai saat ini kedua pihak tetap mempertahankan posisi diplomatik yang saling bertentangan. Maroko berpegang pada *Moroccan Autonomy Initiative* sebagai satu-satunya solusi, sedangkan Front Polisario tetap menegaskan penentuan nasib sendiri sebagai prinsip utama penyelesaian dekolonisasi (United Nations, 2025). Upaya Utusan Pribadi Sekretaris-Jenderal untuk melanjutkan dialog juga buntu. Belum ada solusi yang “realistis, praktis, dan dapat diterima bersama” dalam perpanjangan mandat MINURSO hingga 2025.

Dalam konteks dinamika konflik Sahara Barat, PBB mencatat bahwa Maroko menggunakan pendekatan pembangunan dan ekonomi sebagai strategi normalisasi kontrol atas Sahara Barat. Melalui penyampaian nota diplomatik, Maroko menekankan implementasi *New Development Model* yang berfokus pada eksploitasi sumber daya dan pembangunan ekonomi di wilayah barat *berm* sebagai bagian dari narasi stabilitas administratif (United Nations, 2025).

Pergeseran ini memperlihatkan transformasi arena konflik. Berawal dari sengketa status politik menjadi kontestasi ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, proyek energi, dan integrasi ekonomi sebagai alat klaim teritorial. Sejalan dengan momentum transisi energi global, potensi besar energi surya dan angin di Sahara Barat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan ketergantungan ekonomi wilayah pada sistem nasional Maroko. Dengan memposisikan Sahara Barat

sebagai sumber energi terbarukan, Maroko secara de facto memperkuat kolonialisasi ekonomi melalui eksploitasi sumber daya dan integrasi struktural, sehingga arena konflik kini tidak hanya berada pada ranah diplomasi, tetapi juga pada perebutan kendali atas energi dan pembangunan infrastruktur.

2.3. Fragmentasi Politik dan Sosial Masyarakat Sahara Barat

Fragmentasi masyarakat Sahara Barat tidak terbentuk menjadi satu kelompok yang sepenuhnya homogen, melainkan terbagi menjadi dua faksi, yakni ; Front Polisario dan Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP). Kedua faksi ini muncul akibat sejarah kolonialisme, konflik politik, serta pengaruh aktor regional. Masyarakat yang mendukung penentuan nasib sendiri dengan merdeka sepenuhnya diwakili oleh Front Polisario. Sedangkan, masyarakat yang mendukung intergasi otonom dengan Maroko diwakili oleh Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP).

2.1.1. Front Polisario

Faksi Front Polisario merupakan organisasi masyarakat yang paling dominan di Sahara Barat dan salah satu faksi utama masyarakat Sahrawi yang mendukung kemerdekaan Sahara Barat. Fragmentasi ini mulai terlihat sejak wilayah Sahara Barat masih menjadi koloni Spanyol hingga proses dekolonisasi pada tahun 1970-an. Organisasi ini didirikan pada tahun 1973 oleh kaum nasionalis Sahrawi dengan tujuan mengakhiri penjajahan Spanyol dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Sahara Barat. Setelah Spanyol menarik diri pada tahun 1975, Front Polisario memproklamasikan berdirinya Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) sebagai bentuk klaim kedaulatan politik. Saat ini, sebagian besar pendukung Front Polisario berasal dari masyarakat Sahrawi yang tinggal di kamp pengungsi di Tindouf, Aljazair, serta diaspora Sahrawi di berbagai negara. Kelompok ini tetap mempertahankan identitas nasional Sahrawi dan secara konsisten

menuntut pelaksanaan referendum kemerdekaan sebagaimana direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Zunes & Mundy, 2010).

Front Polisario juga dianggap sah sebagai perwakilan masyarakat Sahara Barat untuk hak *self-determination* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1979, terutama setelah misi identifikasi PBB tahun 1975 yang menyimpulkan adanya konsensus dari Sahrawi untuk kemerdekaan dari penjajahan Spanyol dan invasi Maroko-Mauritania (United Nations, 1975). Secara hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan kriteria utama untuk perwakilan hak self-determination berdasarkan Pasal 1(2) Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) (1960), dan 2625 (XXV) (1970), yang menekankan bahwa perwakilan harus mewakili "bangsa" (*people*) secara keseluruhan dengan konsensus mayoritas melalui otoritas efektif, kontrol wilayah nyata, dan dukungan *overwhelming* dari penduduk indigenous tanpa intervensi asing (United Nations General Assembly, 1960; United Nations General Assembly, 1970). Kriteria perwakilan mencakup pada legitimasi historis (sebagai penerus kekuatan kolonial), efektivitas pemerintahan (*de facto control*), dan representasi inklusif melalui majelis tradisional atau pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Advisory Opinion ICJ tentang Sahara Barat (1975) yang mengharuskan perwakilan mencerminkan kehendak bebas penduduk tanpa manipulasi demografis (International Court of Justice, 1975). PBB juga menilai kontinuitas perjuangan anti-kolonial dan pengakuan oleh organisasi regional seperti OUA/AU sebagai indikator sah, dengan pengecualian jika ada faksi saingan yang terfragmentasi atau tidak efektif (United Nations General Assembly, 1979). Kriteria PBB yang bersifat fleksibel dan kontekstual, lebih mengutamakan efektivitas politik

daripada sensus demokratis sempurna, yang memungkinkan pengakuan cepat di era dekolonisasi pasca-1960.

Front Polisario memenuhi kriteria ini melalui pengakuan eksplisit PBB sejak Resolusi 34/37 (1979), yang lahir dari laporan misi 1975 yang menemukan "*overwhelming consensus*" Sahrawi untuk kemerdekaan, menjadikan mereka penerus sah pasca-penarikan Spanyol dan mundurnya Mauritania (United Nations, 1975). *Overwhelming consensus* merujuk pada kesepakatan atau dukungan yang sangat dominan dan hampir bulat dari suatu populasi, yang melebihi sekadar mayoritas sederhana (50%+1) dan mendekati konsensus universal tanpa oposisi signifikan, sebagaimana digunakan PBB dalam konteks hak self-determination untuk membenarkan pengakuan perwakilan politik (United Nations, 1975). Front Polisario menunjukkan kontrol efektif atas zona bebas 20% wilayah timur tembok Maroko serta pemerintahan de facto di kamp Tindouf (165.000 pengungsi), didukung djema'a suku Hassaniya seperti Reguibat, sesuai sensus Spanyol 1974 yang mencatat 73.497 jiwa indigenous (Instituto Nacional de Estadística, 1974; Zoubir, 2019). Pengakuan OUA/AU (38 negara anggota SADR) dan interaksi berkelanjutan MINURSO (1991-2025) memperkuat status mereka sebagai satu-satunya pihak substantif dalam negosiasi, meski faksi seperti MSP muncul belakangan (Barikallah, 2020). Polisario unggul karena vakum kekuasaan pasca-1975 dan dukungan diaspora pengungsi, tapi legitimasi mereka tererosi oleh kegagalan referendum serta tuduhan manipulasi sensus Tindouf oleh Aljazair, menunjukkan kriteria PBB perlu adaptasi untuk pluralisme modern (Shelley, 2025).

2.1.2. Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP).

Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) merupakan faksi masyarakat lain yang mendukung integrasi dengan Maroko dengan

pemberian hak otonom. Faksi ini terbentuk pada 22 April 2020 oleh mantan pimpinan tingkat tinggi Front Polisario, Hach Ahmed Barikallah, yang kecewa dengan kegagalan organisasi tersebut setelah 50 tahun berjuang. MSP menilai Polisario gagal mewujudkan kemerdekaan dan terlalu bergantung pada bantuan Aljazair, terutama saat pandemi COVID-19 mempersulit kondisi kamp pengungsi Tindouf. MSP memilih berbasis di Madrid, Spanyol, dan mempromosikan dialog damai dengan mendukung rencana otonomi Maroko tahun 2007 sebagai solusi realistis. Pada 2025, mereka diterima sebagai anggota Internationale Socialiste berkat dukungan partai Maroko USFP (Le Matin du Sahara, 2025). MSP muncul karena perubahan pola pikir generasi muda Sahrawi yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi daripada ideologi kemerdekaan. Situasi ini sama seperti fenomena transformasi PLO Palestina menjadi lebih pragmatis.

Akan tetapi, pengaruh MSP relatif kecil secara jumlah pendukung, berkisaran 10-15% dari masyarakat Sahrawi di wilayah Maroko dan diaspora Eropa tetapi signifikan secara diplomatik. MSP juga membentuk "Komisi Dialog Dakar" yang melibatkan tetua suku dari berbagai wilayah dan mendapat dukungan dari 118 negara yang mendukung otonomi Maroko. MSP juga efektif mengkritik pelanggaran HAM oleh Polisario di kamp Tindouf melalui media Barat. Meski kalah jumlah dari 165.000 pengungsi Tindouf yang dikuasai Polisario, MSP berperan sebagai pengganggu politik yang ubah negosiasi dari dua pihak (Polisario-Maroko) menjadi melibatkan banyak pemangku kepentingan, meski masih terbatas secara massa. Selain itu, MSP berhasil melobby agar utusan PBB Staffan de Mistura mempertimbangkan aktor Sahrawi di luar Polisario (Dakar Times, 2025). Akan tetapi, hingga kini perwakilan masyarakat Sahara Barat yang dianggap sah oleh PBB masih Front Polisario.

PBB tetap mengakui Polisario sebagai perwakilan Sahrawi berdasarkan Resolusi 34/37 tahun 1979 dan temuan " *overwhelming consensus*" tahun 1975, sedangkan MSP yang baru muncul 2020 tidak memenuhi kriteria penguasaan wilayah atau dukungan mayoritas seperti Polisario yang mengontrol zona bebas dan kamp Tindouf. Misi MINURSO secara formal hanya mengakui dua pihak: Polisario dan Maroko. MSP dianggap faksi kecil yang pro-Maroko tanpa legitimasi lapangan sebanding, mirip penolakan PBB terhadap kelompok pecah dari ETA di Spanyol (United Nations General Assembly, 1979). Keputusan PBB lebih berdasarkan kebiasaan birokrasi daripada realitas politik terkini; mengabaikan MSP justru memperkuat narasi Maroko bahwa Polisario membungkam pluralisme Sahrawi. Hal ini juga berpengaruh pada proses referendum kemerdekaan Sahara Barat yang terhambat karena perbedaan daftar pemilih. Front Polisario bersikukuh menggunakan sensus Spanyol tahun 1974 sebagai data populasi autentik masyarakat Sahrawi, karena sensus tersebut juga ditetapkan sebagai basis resmi PBB dalam proses identifikasi pemilih untuk referendum (United Nations Security Council, 1990, S/21360).

MSP secara terbuka menyatakan diri sebagai "Sahrawi asli" yang siap ikut serta dalam referendum versi Maroko. Mereka mewakili tetua suku dan warga wilayah yang dikuasai Maroko yang menolak pemisahan, serupa dengan strategi Rabat untuk menambah pemilih pro-otonomi dalam daftar sensus 1974 ditambah 400.000 pemukim Maroko. Sejak 2007, Maroko memang ingin melibatkan tokoh suku tradisional seperti pendukung MSP untuk melegitimasi rencana otonomi. MSP juga mendorong "dialog semua faksi" termasuk dalam pemungutan suara hipotetis, berbeda dengan Polisario yang hanya mengakui pengungsi Tindouf (Le Matin du Sahara, 2025). MSP adalah aset strategis bagi Maroko dalam skenario referendum, tetapi statusnya kontroversial karena dituduh

sebagai proksi Rabat; ini menyoroti dilema self-determination modern.